

**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
TAHUN 2013-2018**



**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Padang Panjang**

2017



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.

Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan **RENSTRA OPD** adalah dokumen perencanaan **OPD** untuk periode lima (5) tahun, yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah.

Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis SKPD (Renstra-SKPD).

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilan perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi dan misi organisasi. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Sesuai dengan Peraturan perundangan yang berlaku bahwa setiap OPD perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) OPD sebagai dokumen perencanaan jangka menengah di setiap OPD untuk jangka waktu lima tahun. Renstra OPD disusun sesuai dengan tugas dan fungsi OPD serta berpedoman kepada RPJM Daerah. Penyusunan Renstra OPD terdiri dari tahapan sebagai berikut : Persiapan penyusunan Renstra SKPD, Penyusunan Rancangan Renstra OPD, Penyusunan rancangan akhir Renstra OPD dan Penetapan Renstra OPD.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai OPD teknis yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam pelaksanaan pembangunan daerah memiliki peran dan fungsi strategis dalam pelaksanaan pembangunan. Untuk mendukung pelaksanaan tupoksi DPUPR diperlukan suatu Dokumen Rencana Strategis yang memberi arah kebijakan dan fokus program dalam lima tahun mendatang. Dokumen Renstra DPUPR tersebut harus terintegrasi dengan dokumen perencanaan jangka menengah kota yaitu RPJMD Kota Padang Panjang 2013-2018.

Renstra merupakan komitmen DPUPR yang digunakan sebagai tolak ukur dan alat bantu bagi perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam kebijakan



perencanaan Pembangunan Kota Padang Panjang serta sebagai Pedoman dan acuan dalam mengembangkan dan meningkatkan kinerja sesuai dengan kewenangan, Tugas pokok dan fungsi DPUR dalam rangka pencapaian visi Kota Padang Panjang yaitu **“PADANG PANJANG AMANAH, AMAN DAN SEJAHTERA”**.

Dengan adanya perubahan struktur kelembagaan perangkat Daerah Kota Padang Panjang sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dimana untuk Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang Panjang berubah menjadi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang Panjang.

Dengan adanya perubahan Organisasi Perangkat Daerah diatas, yang juga berimplikasi terhadap perubahan kewenangan dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dimana urusan yang sebelumnya ditangani oleh Dinas Pekerjaan Umum adalah urusan Pekerjaan Umum, urusan Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman dan urusan Pengelolaan Kebersihan, sekarang berubah menjadi urusan yang ditangani adalah urusan Pekerjaan Umum, urusan Penataan Ruang dan urusan Pertanahan sedangkan urusan perumahan dan permukiman dan urusan pengelolaan kebersihan ditangani oleh Organisasi Perangkat Daerah tersendiri di luar Dinas Pekerjaan Umum.

Adapun rincian Bidang urusan sebagaimana tersebut diatas dapat diuraikan dalam Tupoksi Dinas Pekerjaan Umum dan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang Panjang.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dipandang perlu untuk melakukan perubahan atas Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang Panjang untuk pelaksanaan tahun ke-4 dan ke-5 dari periode Renstra SKPD yang telah ditetapkan sebelumnya pada Tahun 2014 dan juga mengsinkronkan dengan adanya perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Panjang Tahun 2013-2018 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Panjang Tahun 2013-2018.



1.2. Landasan Hukum

- a. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah.
- b. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- c. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- d. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- e. Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- g. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Padang Panjang Tahun 2013-2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Padang Panjang Tahun 2013-2018.
- h. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
- i. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang Panjang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang Panjang.

1.3. Maksud dan Tujuan.

Maksud dari Penyusunan Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang Panjang adalah melakukan penyesuaian arah dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan tahunan bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam melaksanakan tugas dan fungsi khususnya dalam kurun waktu 5 tahun mengacu kepada RPJMD tahun 2014-2018.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) adalah untuk :



- a. Mengoptimalkan tugas pokok, fungsi dan peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) sebagai institusi pelaksana pembangunan dalam mencapai target pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Panjang Tahun 2013-2018.
- b. Menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Padang Panjang.

1.4. Sistematika Penulisan.

Perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang Panjang Tahun 2013 – 2018 terdiri dari :

- Bab I Pendahuluan yang berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.
- Bab II Gambaran Umum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang Panjang yang berisi Tugas Pokok dan Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD, Kinerja pelayanan SKPD, Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan SKPD.
- Bab III Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi berisi Identifikasi permasalahan, telaahan visi misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah, telaahan renstra K/L dan renstra SKPD propinsi, telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan strategis serta penentuan isu-isu strategis.
- Bab IV Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategi dan Kebijakan yang memuat Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang Panjang, Tujuan dan Sasaran jangka menengah SKPD serta Strategi dan Kebijakan.
- Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif.
- Bab VI Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.



BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA PADANG PANJANG

2.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

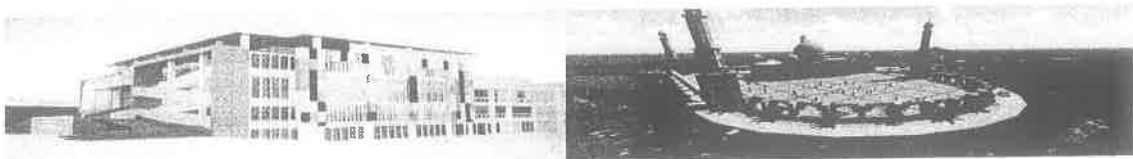
Kedudukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang Panjang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Walikota Padang Panjang melalui Sekretaris Daerah Kota Padang Panjang yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pentukan dan Susunan Perangkat Daerah, urusan Pemerintah Daerah yang diselenggarakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang Panjang mencakup urusan bidang pekerjaan umum, bidang penataan ruang dan bidang pertanahan.

Adapun rincian urusan sebagaimana tersebut diatas dapat diuraikan dalam Tupoksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang Panjang sesuai dengan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang Panjang.

Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang Panjang adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Bidang Bina Program, Perencanaan dan Jasa Konstruksi, terdiri dari :
 1. Seksi Perencanaan;
 2. Seksi Pendataan dan Program; dan
 3. Seksi Bina Jasa Konstruksi.
- d. Bidang Bina Marga dan Sumber Daya Air, terdiri dari;
 1. Seksi Pembangunan Prasarana Jalan dan Jembatan;

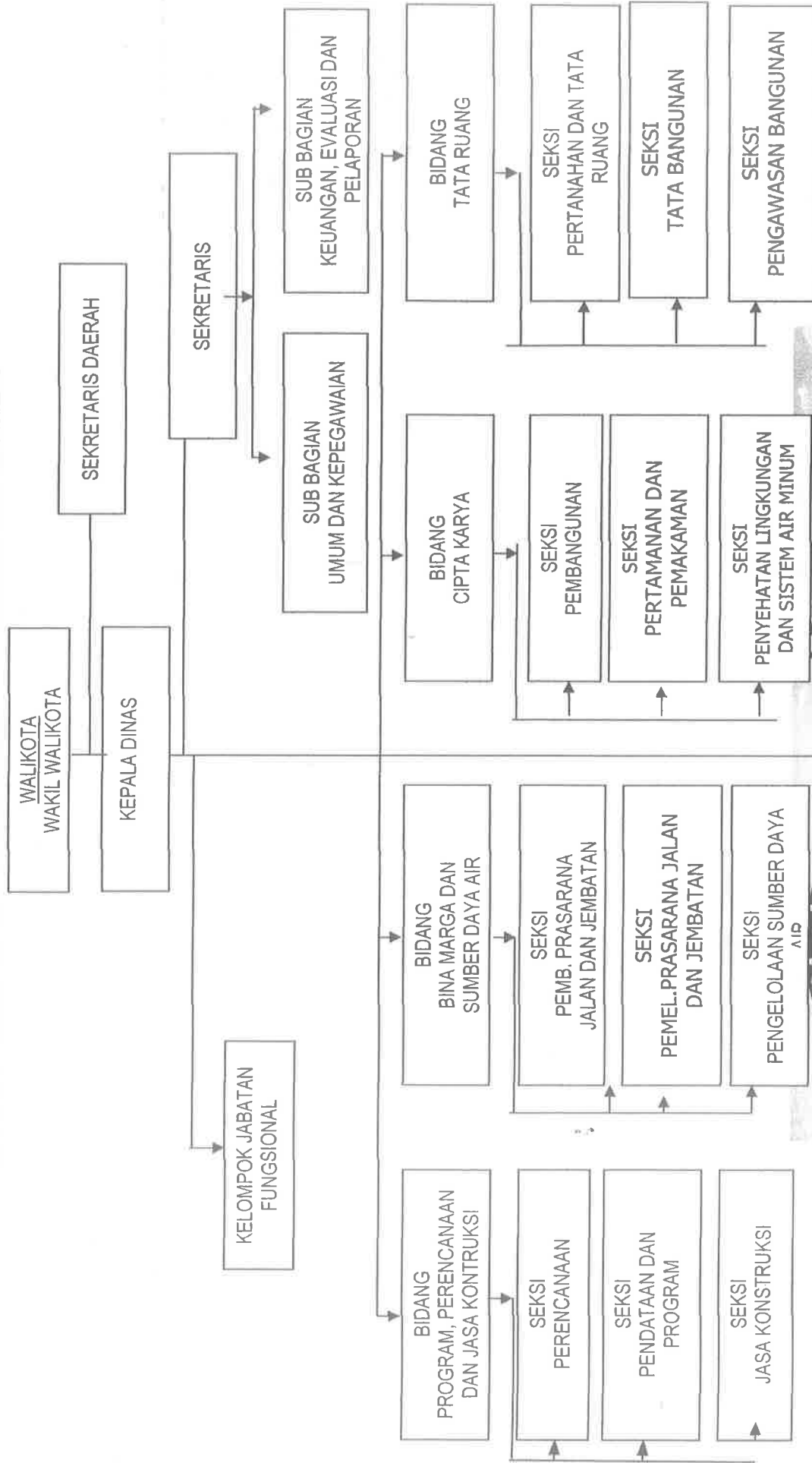


2. Seksi Pemeliharaan Prasarana Jalan dan Jembatan; dan
 3. Seksi Pengelolaan Sumber Daya Air.
- e. Bidang Cipta Karya, terdiri dari :
1. Seksi Pembangunan;
 2. Seksi Pertamanan dan Pemakaman; dan
 3. Seksi Penyehatan Lingkungan dan Sistem Air Minum.
- f. Bidang Tata Ruang, terdiri dari;
1. Seksi Pertanahan dan Tata Ruang;
 2. Seksi Tata Bangunan; dan
 3. Seksi Pengawasan Bangunan.
- g. UPTD; dan
- h. Kelompok jabatan fungsional.

Berikut ini adalah Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang Panjang :



**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PADANG PANJANG
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN
SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG**



2.1.1 Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, bidang Pertanahan dan tugas pembantuan yang diberikan.

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan;
- d. pengkoordinasian dan pembinaan penyelenggaraan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan teknis kegiatan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan skala kota;
- e. pelaksanaan administrasi dinas di bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

2.1.2 Sekretaris

Sekretariat dikepalai oleh Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan Organisasi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Sekretaris dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana dibidang administrasi umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan;
- b. pengelolaan program administrasi umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan;
- c. pelaksanaan urusan hukum, organisasi dan tata laksana serta kehumasan; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai tugas dan fungsinya.



2.1.2.1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan program administrasi umum dan kepegawaian dalam arti melaksanakan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian, urusan surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, penggandaan, administrasi perjalanan dinas, kerumahtanggaan, peralatan dan perlengkapan kantor, melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, hukum, organisasi dan tata laksana serta kehumasan.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian;
- b. pemberian dukungan dibidang kerumahtanggaan, humas, keprotokolan, organisasi dan tataksana serta fasilitasi pembentukan produk hukum;
- c. penatausahaan barang milik daerah; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

2.1.2.2 Sub Bagian Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan

Sub Bagian Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas menyelenggarakan program keuangan dalam arti melaksanakan penyusunan anggaran, pembukuan, akuntansi dan verifikasi, pertanggungjawaban dan laporan keuangan serta evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan.

Sub Bagian Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi :

- a. Penatausahaan keuangan;
- b. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan; dan
- c. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

2.1.3 Bidang Bina Program, Perencanaan dan Jasa Konstruksi

Bidang Bina Program, Perencanaan dan Jasa Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di bidang perencanaan, pendataan dan program serta bina jasa konstruksi.



Bidang Bina Program, Perencanaan dan Jasa Konstruksi mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program perencanaan;
- b. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program pendataan dan program;
- c. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program bina jasa konstruksi; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

2.1.3.1 Seksi Perencanaan

Seksi Perencanaan mempunyai tugas menyelenggarakan program perencanaan di bidang pekerjaan umum dalam arti melaksanakan penyusunan, perencanaan dan pengkoordinasian serta memberikan bantuan-bantuan teknis dalam proses perencanaan pembangunan skala daerah.

Seksi Perencanaan mempunyai fungsi :

- a. pemeriksaan perencanaan pembangunan dalam skala kota;
- b. pemberian bantuan teknis dalam proses perencanaan pembangunan;
- c. pelaksanaan analisa satuan pekerjaan pembangunan; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

2.1.3.2 Seksi Pendataan dan Program

Seksi Pendataan dan Program mempunyai tugas menyelenggarakan program pendataan dan program dalam arti mengumpulkan, menghimpun, mengolah dan mengkoordinasikan data dan menyusun program kerja dinas dengan berkoordinasi dengan unit kerja.

Seksi Pendataan dan Program mempunyai fungsi:

- a. pengumpulan dan pengolahan data bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- b. penyusunan rencana kerja bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- c. pendokumentasian data dan informasi kegiatan;
- d. pengkoordinasian penyusunan anggaran belanja dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya;

2.1.3.3. Seksi Bina Jasa Konstruksi



- a. perencanaan program kegiatan pembangunan prasarana jalan dan jembatan;
- b. pelaksanaan program kegiatan pembangunan prasarana jalan dan jembatan;
- c. penyiapan bahan rekomendasi teknis pemanfaatan ruang jalan;
- d. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

2.1.4.2 Seksi Pemeliharaan Prasarana Jalan dan Jembatan

Seksi Pemeliharaan Prasarana Jalan dan Jembatan mempunyai tugas menyelenggarakan program pemeliharaan prasarana jalan, jembatan dalam arti melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pemeliharaan rutin, berkala dan periodik pada jalan dan jembatan, riol, berm yang ada dalam skala kota.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pemeliharaan Prasarana Jalan dan Jembatan mempunyai fungsi :

- a. perencanaan program kegiatan pemeliharaan prasarana jalan dan jembatan;
- b. pelaksanaan program kegiatan pemeliharaan prasarana jalan dan jembatan;
- c. penyiapan konsep rencana perbaikan jalan dan jembatan;
- d. pembinaan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

2.1.4.3 Seksi Pengelolaan Sumber Daya Air

Seksi Pengelolaan Sumber Daya Air mempunyai tugas menyelenggarakan program pengelolaan sumber daya air dalam arti melaksanakan perencanaan, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pelaksanaan kegiatan pembangunan, pemeliharaan, perizinan dan pemanfaatan pengairan serta penanggulangan darurat kerusakan infrastruktur sumber daya air akibat bencana atau daya rusak air.



Seksi Pengelolaan Sumber Daya Air mempunyai fungsi :

- a. perencanaan program kegiatan pengelolaan sumber daya air;
- b. pelaksanaan program dan kegiatan pengelolaan sumber daya air;
- c. pembinaan perizinan pemanfaatan sumber daya air; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

2.1.5 Bidang Cipta Karya

Bidang Cipta Karya mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum di bidang bangunan gedung, pengembangan sistem penyediaan air minum, pengembangan sistem pengelolaan air limbah dan drainase lingkungan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Cipta Karya mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program pembangunan;
- b. Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program pertamanan dan pemakaman;
- c. Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program penyehatan lingkungan dan sistem air minum; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan kepala dinas sesuai tugas dan fungsinya.

2.1.5.1 Seksi Pembangunan

Seksi Pembangunan mempunyai tugas menyelenggarakan program pembangunan daerah dalam arti melaksanakan pembangunan, bantuan teknik, pengawasan, pengendalian pembangunan bangunan gedung negara dan bangunan umum serta pengaturan dan pengendalian perizinan pembangunan.

Seksi Pembangunan mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan program pembangunan keciptakaryaan skala kota;
- b. Pelaksanaan program pembangunan keciptakaryaan;
- c. Pembinaan perizinan bangunan; dan



d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

2.1.5.2 Seksi Pertamanan dan Pemakaman

Seksi Pertamanan dan Pemakaman mempunyai tugas menyelenggarakan program pertamanan dan pemakaman dalam arti melaksanakan perencanaan, pembinaan, pengawasan, pemeliharaan dan perbaikan, sarana prasarana pertamanan, penerangan jalan umum, lampu hias dan pemakaman umum serta ruang terbuka hijau dalam wilayah kota.

Seksi Pertamanan dan Pemakaman mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan program pertamanan dan pemakaman skala kota;
- b. Pelaksanaan penataan pertamanan dan pemakaman;
- c. Penataan penerangan jalan umum dan lampu hias dalam kota; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

2.1.5.3 Seksi Penyehatan Lingkungan dan Sistem Air Minum

Seksi Penyehatan Lingkungan dan Sistem Air Minum mempunyai tugas menyelenggarakan program penyehatan lingkungan dan sistem air minum dalam arti melaksanakan perencanaan, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pembangunan dan pelaporan perkembangan sarana dan prasarana di bidang teknik penyehatan lingkungan yang meliputi urusan-urusan air bersih, air buangan, kawasan kumuh, Kampung Improvement Program (KIP) dan perbaikan/pemeliharaan drainase dalam kota serta pengendalian dan pencegahan pencemaran lingkungan hidup.

Seksi Penyehatan Lingkungan dan Sistem Air Minum mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan program penyehatan lingkungan dan sistem air bersih skala kota;
- b. Pelaksanaan pembangunan pemeliharaan sarana prasarana penyehatan lingkungan dan sistem air bersih skala kota;
- c. Pemeliharaan sarana prasarana penyehatan lingkungan dan sistem air bersih skala kota; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.



2.1.6. Bidang Tata Ruang

Bidang Tata Ruang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum di bidang pertanahan dan tata ruang, penataan bangunan dan pengawasan bangunan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Tata Ruang mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program pertanahan dan penataan ruang;
- b. Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program penataan bangunan;
- c. Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program pengawasan bangunan; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

2.1.6.1 Seksi Pertanahan dan Tata Ruang

Seksi Pertanahan dan Tata Ruang mempunyai tugas menyelenggarakan program pertanahan dan penataan ruang dalam arti melaksanakan perencanaan, penelitian, pengumpulan dan pengolahan data untuk perencanaan pembangunan daerah serta mengendalikan, mengarahkan dan mengevaluasi perkembangan pembangunan fisik kota sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang Kota, pemanfaatan lingkungan, kemungkinan pengembangan fisik kota, serta menyelenggarakan pelayanan Advice Planning kepada masyarakat.

Seksi Pertanahan dan Tata Ruang mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan program pertanahan dan tata ruang skala kota;
- b. Penyusunan rencana kebutuhan lahan;
- c. Pemrosesan penerbitan advice planning dan rekomendasi perizinan; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

2.1.6.2 Seksi Tata Bangunan

Seksi Tata Bangunan mempunyai tugas menyelenggarakan program penataan bangunan dalam arti melaksanakan penataan bangunan, pembinaan, pengawasan dan



pengendalian pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB), struktur bangunan dan persyaratan serta mengkoordinir penerimaan sumber-sumber pendapatan di bidang tata ruang dan tata bangunan.

Seksi Tata Bangunan mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan program tata bangunan skala kota;
- b. Pelaksanaan program tata bangunan skala kota;
- c. Pemeriksaan persyaratan teknis imb;
- d. Pertimbangan teknis penerbitan sertifikasi laik fungsi bangunan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

2.1.6.3 Seksi Pengawasan Bangunan

Seksi Pengawasan Bangunan mempunyai tugas menyelenggarakan program pengawasan bangunan dibidang tata ruang dan tata bangunan dalam arti melaksanakan pengawasan terhadap pengendalian pemanfaatan ruang, pengawasan dan pengkoordinasian terhadap penataan bangunan pelaksanaan Izin Mendirikan Bangunan, mengawasi struktur bangunan masyarakat serta mengevaluasi hasil-hasil pemanfaatan ruang dan penataan bangunan.

Seksi Pengawasan Bangunan mempunyai fungsi :

- a. perencanaan program pengawasan bangunan;
- b. pengawasan pelaksanaan tata ruang dan tata bangunan;
- c. pengawasan terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dan IMB; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

2.2. Sumber Daya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang Panjang.

2.2.1. Kepegawaian

Kondisi pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang Panjang berdasarkan status kepegawaian dapat dilihat pada Tabel 1 berikut ini



Tabel. 2.2

Jumlah PNS/CPNS dan Pegawai Tenaga Harian Lepas (THL) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang Panjang Tahun 2017

No	Uraian	Jenis kelamin		Jumlah	%
		Laki-laki	Perempuan		
1	PNS	39	11	50	54,94
2	CPNS	-	-	-	-
3	Tenaga Honor	21	20	41	45,06
	Jumlah	60	31	91	100

Dari Tabel.2.2 diatas dapat dilihat bahwa jumlah seluruh pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang Panjang adalah 91 (Sembilan puluh satu) orang. Pegawai yang berstatus PNS berjumlah 50 (Lima puluh) orang dan Pegawai Tenaga Lepas Harian (THL) berjumlah 41 (Empat Puluh Satu) orang.

Kondisi pegawai menurut golongan dapat dilihat pada Tabel. 2.3

Tabel. 2.3

Jumlah PNS/CPNS dan Pegawai Tenaga Harian Lepas (THL) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang Panjang menurut golongan Tahun 2017

No	Uraian	Jenis kelamin		Jumlah	Porsentase (%)
		Laki-laki	Perempuan		
1	PNS				
	Golongan I	1	-	1	1,09
	Golongan II	16	1	17	18,68
	Golongan III	21	9	30	32,96
	Golongan IV	1	1	2	2,19
2	CPNS	-	-	-	-
3	Tenaga Honor/Sukarela	21	20	41	45,05
	Jumlah	60	31	91	100



Pada Tabel. 2.3 dapat dilihat bahwa jumlah pegawai terbanyak adalah pegawai Tenaga Harian Lepas (THL) yaitu 41 (Empat Puluh Satu) orang. Pegawai dengan golongan IV berjumlah 2 (Dua) orang yang terdiri dari satu Kepala Dinas dan Satu Sekretaris Dinas. Pegawai dengan golongan III berjumlah 30 (tiga puluh) orang. Sedangkan pegawai dengan golongan II berjumlah 17 (Tujuh Belas) orang, dan Golongan I berjumlah 1(Satu) Orang.

Tabel. 2.4

Jumlah PNS/CPNS Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang Panjang menurut jenjang pendidikan formal

Tahun 2017

No	Uraian	Jenis kelamin		Jumlah	%
		Laki-laki	Perempuan		
1	SD	1	-	1	2,08
2	SLTP	1	-	1	2,08
3	SLTA	13	-	13	27,08
4	Sarjana Muda/D3	3	3	6	12,5
5	Sarjana	15	11	26	54,17
6	Pasca Sarjana	1	-	1	2,08
	Jumlah	34	14	48	100

Jumlah pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang Panjang berdasarkan jenjang pendidikan formal yang terlihat pada tabel 3 diatas menunjukkan bahwa jumlah pegawai yang terbanyak adalah dengan pendidikan setingkat sarjana yaitu sebanyak 26 (dua puluh enam) orang. Pegawai dengan jenjang pendidikan SLTA sebanyak 13 (Tiga Belas) orang, sedangkan pegawai yang mempunyai pendidikan Sarjana Muda sebanyak 6 (enam) orang dan SLTP sebanyak 1 (Satu) orang serta SD sebanyak 1 (satu) orang.



2.2.2. Sarana dan Prasarana.

Kondisi sarana dan prasarana pendukung untuk kelancaran kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang Panjang dapat dilihat pada Tabel. 2.5:

Tabel. 2.5
Sarana dan Prasarana pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang Panjang
Tahun 2017

NO	JENIS SARANA PRASARANA	JUMLAH (BUAH/UNIT)
1.	Kendaraan Roda Dua (Sepeda Motor)	13 unit
2.	Kendaraan Roda Tiga (Betor Sampah)	12 unit
3.	Truk sampah	9 unit
4.	Truk Tinja	2 unit
5.	Truk Amroll	2 unit
6.	Truk Lampu Jalan	2 unit
7.	Kijang Pick Up	6 unit
8.	Kijang Super	1 unit
9.	Mini Bus	4 unit
10.	Bulldozer	2 unit
11.	Mesin Gilas	2 unit
12.	Excavator	1 unit
13.	Mesin Potong Rumput	3 unit
14.	GPS	2 unit
15.	Meteran Digital	2 unit
16.	Teen Scale	1 unit
17.	Mesin Pencacah Sampah	1 unit
18.	Tangki 100 ltr	1 unit
19.	Timbangan Duduk	1 unit
20.	Container Sampah	15 unit



21.	Mesin Tik Manual	1 unit
22.	Filling Kabinet	6 unit
23.	Lemari Arsip	1 buah
24.	Papan nama Instansi	1 buah
25.	Billboard IMB	40 buah
26.	Papan Informasi	1 buah
27.	Papan DUK	1 buah
28.	Lemari Kayu	10 buah
29.	Kursi Rapat	51 buah
30.	Kursi Tamu	4 buah
31.	Meja ½ Biro	46 buah
32.	Meja Rapat Pimpinan	1 buah
33.	Komputer SIPKD	1 unit
34.	Laptop	17 unit
35.	Printer	10 unit
36.	Brankas	1 unit
37.	Kursi Sandaran Tinggi	2 buah
38.	Lemari Mini	1 unit
39.	Komputer PC	13 unit
40.	UPS	3 unit
41.	Infocus	1 unit
42.	Kamera	2 unit
43.	Teodolit	1 buah
44.	Telepon	1 buah
45.	Wireless	1 buah
46.	HT	1 buah

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang Panjang.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Organisasi Perangkat Daerah Kota Padang Panjang, urusan



Pemerintahan yang diselenggarakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang Panjang mencakup urusan bidang pekerjaan umum, bidang pertanahan dan bidang penataan ruang.

Hasil pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang Panjang Tahun 2008-2013 dapat dilihat pada Tabel 2.6 berikut ini :



Tabel.2.6
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PADANG PANJANG
Tahun 2014-2016

No	Indikator	Satuan	Target SPM	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Kinerja Sasaran pada Tahun ke				Realisasi Capaian Tahun ke				Realisasi Capaian Tahun ke						
						2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Tersedianya pengelolaan administrasi ketatausahaan, keuangan, sarana dan prasarana	tahun	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100
2	Terlaksananya pelayanan pembuatan AP dan IMB	lokasi	-	-	-	100	300	250	200	200	100	300	250	250	100	100	100	100	100	100
	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam penataan ruang	buah	-	-	-	10	10	10	2	2	10	10	10	10	100	100	100	100	100	100
	Terlaksananya pelayanan kebinamargaan dan pengairan	tahun	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100	100
	Terlaksananya pelayanan keciptakarya	% (pengelolaan drainase)	-	-	-	82 %	84 %	86 %	88 %	90 %	82 %	84 %	86 %	86 %	100	100	100	100	100	100



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
3	Tersedianya dokumen perencanaan infrastruktur yang berkualitas (termasuk RDTR dan PZ)	dokumen	-	-	-	18	15	10	7	7	18	15	10			100	100	100		
	Tersedianya infrastruktur keciptakarya yang berkualitas	Unit gedung kantor DAK Air bersih air limbah	-	-	-	6 1	4 1	3 1	2 1	1 1	6 1	4 1	3 1			100	100	100		
	Tersedianya infrastruktur kebinamargaan dan pengairan yang berkualitas	Km (panjang jalan)	-	-	-	1,15	1	1	1	1	1,15	1	1			100	100	100		
4	Tersedianya Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang fungsional dan estetik	Lokasi	-	-	-	2	1	1	1	1	2	1	1			100	100	100		
	Terselenggaranya 3R (Reuse,Reduce, Recycle)	Kel/Sekolah (sosialisasi)	-	-	-	0/0 39	16/ 39	0/3 4	0	0	0/0	16/ 39	0/3 4			100	100	100		



2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang Panjang.

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang Panjang menyusun strategi yang mengacu pada faktor kekuatan dan kelemahan internal serta faktor peluang dan ancaman eksternal.

2.4.1 Faktor Internal.

Sesuai dengan visi dan misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang Panjang, maka dilakukan identifikasi terhadap faktor-faktor internal sebagai berikut :

a. Strength (S): Kekuatan.

1. Adanya komitmen pimpinan dalam pembaharuan system dan mekanisme pelaksanaan tugas.
2. Tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang Panjang sebagai perencana, pemanfaatan, pengawasan tata ruang dan tata bangunan, penyediaan sarana dan prasarana umum.
3. Adanya tenaga teknis.
4. Tersedianya dana untuk pembangunan fisik sarana dan prasarana Kota Padang Panjang.
5. Adanya Pembagian tugas yang jelas, mulai dari Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian dan Staf.

b. Weakness (W) Kelemahan:

1. Masih rendahnya disiplin kerja sebagian karyawan.
2. Belum lengkapnya sarana dan prasarana penunjang untuk kelancaran pekerjaan.
3. Masih terbatasnya teknologi penunjang pelaksanaan pekerjaan.
4. Data Base yang belum lengkap sehingga hasil perencanaan fisik belum optimal.
5. Penempatan karyawan masih ada yang belum sesuai dengan pendidikan.
6. Belum optimalnya hasil perencanaan fisik secara keseluruhan.
7. Belum profesionalnya tenaga teknik pengusaha jasa konstruksi yang ada.



2.4.2. Faktor Eksternal.

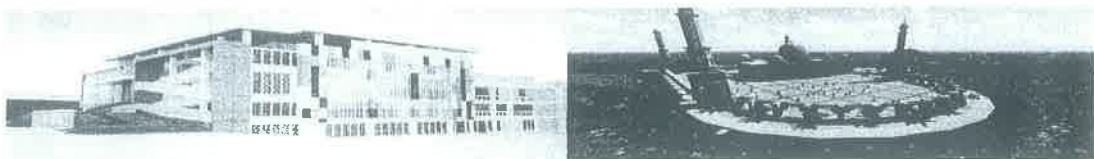
Sesuai dengan visi dan misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang Panjang, maka dilakukan identifikasi terhadap faktor-faktor eksternal sebagai berikut:

a. Oppurtunity (O) Peluang:

1. Letak Geografis Kota Padang Panjang sebagai jalur perlintasan.
2. Dukungan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.
3. Adanya peraturan-peraturan yang memberi peluang bagi pengusaha-pengusaha konstruksi/ konsultan untuk berkembang.
4. Adanya pengusaha Konstruksi dan Non Konstruksi yang terlibat dalam Pembangunan Sarana dan Prasarana Fisik Kota Padang Panjang.
5. Adanya partisipasi masyarakat dalam hal pengawasan pembangunan sarana dan prasarana fisik Kota Padang Panjang.
6. Adanya organisasi-organisasi pengusaha jasa konstruksi dan non konstruksi sebagai mitra kerja bagi pemerintahan dalam hal mewujudkan pembangunan fisik di Kota Padang Panjang.

b. Threats (T) Ancaman:

1. Adanya persaingan bebas antara pengusaha konstruksi/ non konstruksi akibat diberlakukannya Keppres no. 80/2003 beserta perubahannya.
2. Keterbatasan lahan yang bisa dibangun.
3. Belum stabilnya ekonomi nasional dan internasional yang berakibat naik turunnya harga material bahan bangunan.
4. Masih lemahnya koordinasi pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota.
5. Adanya perubahan kebijakan perencanaan dari pemerintah.
6. Perubahan situasi politik lokal.
7. Masih adanya penyedia jasa konstruksi dan non knstruksi lokal yang belum professional.
8. Belum terjalinnya kemitraan yang baik antara pengusaha jasa konstruksi dan non konstruksi dengan pemerintah daerah.



2.4.3. Faktor Lain yang Mempengaruhi.

Untuk menunjang kegiatan dinas untuk tahun kedepan ada beberapa faktor yang mempengaruhi Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkotaan:

1. Pembebasan tanah;
2. Faktor lingkungan;
3. Kondisi tanah yang tidak datar;
4. Sering terjadi gempa bumi;
5. Longsor pada daerah-daerah yang mempunyai kemiringan;
6. Sumber daya manusia (SDM) masih rendah dan terbatas;
7. Alat-alat berat terbatas dan sebagian sudah rusak (telah terpakai lebih 20 tahun);
8. Ruang kantor sangat sempit tidak sesuai dengan jumlah karyawan dan volume pekerjaan yang ada.

Untuk itu kedepannya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang Panjang berupaya melaksanakan Perencanaan, Pemanfaatan, Pengawasan Tata Ruang, Pembangunan sarana dan prasarana umum.



BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang Panjang sesuai dengan tupoksinya merupakan Lembaga Teknis Daerah yang cukup Strategis dalam melaksanakan kebijakan program pembangunan daerah.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut terdapat beberapa permasalahan, antara lain:

1. Masih rendahnya disiplin kerja sebagian karyawan.
2. Belum lengkapnya sarana dan prasarana penunjang untuk kelancaran pekerjaan.
3. Masih terbatasnya teknologi penunjang pelaksanaan pekerjaan.
4. Data Base yang belum lengkap sehingga hasil perencanaan fisik belum optimal.
5. Penempatan karyawan masih ada yang belum sesuai dengan pendidikan.
6. Belum optimalnya hasil perencanaan fisik secara keseluruhan.
7. Belum profesionalnya tenaga teknik pengusaha jasa konstruksi yang ada.
8. Keterbatasan Jumlah SDM (Sumber Daya Manusia).

Identifikasi permasalahan diatas sangat penting untuk menetapkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Selanjutnya perlu dilakukan analisa lingkungan terhadap permasalahan-permasalahan tersebut dengan mempertimbangkan seluruh faktor lingkungan internal yang terdiri atas kekuatan dan kelemahan, serta faktor lingkungan eksternal yang terdiri dari peluang dan ancaman yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Padang Panjang. Analisa ini diperlukan sebagai media untuk memastikan pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan melalui penetapan tujuan (goal) dan sasaran (objective) pembangunan daerah yang ingin dicapai serta strateginya dalam kurun waktu tiga tahun mendatang.

Proses pengidentifikasian analisa lingkungan ini menggunakan metode analisa SWOT dengan melibatkan seluruh komponen pemerintah daerah, masukan masyarakat yang dihimpun dalam dokumen perencanaan lainnya yang mendukung. Melalui Analisis SWOT yaitu analisis dari Strength (kekuatan), Weakness (kelemahan), Opportunity (peluang) dan Threat



(ancaman/tantangan) akan diperoleh rumusan strategi untuk pencapaian sasaran dan tujuan organisasi yang telah direncanakan.

Analisis terhadap lingkungan internal Pemerintah Kota Padang Panjang dilakukan untuk mengidentifikasi potensi positif dan negatif dari internal organisasi pemerintah. Identifikasi ini dimaksudkan agar Pemerintah Kota dapat memaksimalkan potensi dirinya dalam upaya mencapai visi dan misi. Identifikasi tersebut terdiri dari unsur kekuatan dan kelemahan organisasi.

Analisis terhadap lingkungan eksternal Pemerintah Kota Padang Panjang dilakukan untuk mengidentifikasi faktor yang ada diluar organisasi yang dapat berpotensi mengganggu atau sebaliknya mempercepat upaya untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Identifikasi tersebut terdiri dari identifikasi atas unsur peluang dan ancaman yang sedang/kemungkinan dihadapi.

Berdasarkan kondisi yang ada sekarang pada pelaksanaan tugas administrasi kependudukan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang Panjang dapat diidentifikasi faktor Internal dan Eksternal yang mempengaruhi kinerja tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Faktor Internal

- a. *STRENGTH* (Kekuatan), merupakan kemampuan melaksanakan atau menyelesaikan tugas dengan baik dan benar dan sumber daya yang tersedia cukup, serta berada dalam kondisi baik. Adapun faktor-faktor yang ditetapkan sebagai kekuatan (*strength*) adalah :
 1. Tersedianya Sumber Daya Manusia teknis dalam pengelolaan sarana dan prasarana umum.
 2. Adanya dukungan anggaran dari pemerintah.
 3. Adanya komitmen bersama pengelola sarana dan prasarana umum dalam pelaksanaan program dan kegiatan.
- b. *WEAKNESS* (Kelemahan), merupakan kemampuan yang rendah dalam menyelesaikan tugas dan sumber daya yang terbatas serta kapasitasnya kurang. Faktor-faktor yang ditetapkan sebagai kelemahan (*weakness*) yaitu :
 1. Masih kurangnya kompetensi SDM teknis pengelola sarana dan prasarana umum.
 2. Adanya peraturan perundang-undangan yang belum sejalan/kontradiktif dengan kondisi di lapangan.



3. Masih kurangnya sarana dan prasarana kerja.
2. Faktor Eksternal
 - a. *OPPORTUNITIES* (Peluang), merupakan faktor eksternal yang dapat mendatangkan manfaat/keuntungan yang besar di kemudian hari. Faktor yang telah ditetapkan sebagai peluang (*opportunities*) adalah :
 1. Tingginya dukungan pemerintah daerah dan pemerintah pusat terhadap pengelolaan sarana dan prasarana umum
 2. Tiungginya dukungan masyarakat dalam peningkatan sarana dan prasarana umum.
 3. Sistem informasi yang terus berkembang.
 - b. *THREATS* (Ancaman), merupakan faktor eksternal yang menghambat atau mengancam pencapaian tugas organisasi. Faktor yang telah ditetapkan sebagai peluang (*opportunities*) adalah :
 1. Masih rendahnya dukungan tokoh adat dalam pemanfaatan tanah ulayat untuk pembangunan.
 2. Masih rendahnya kepedulian masyarakat terhadap pemeliharaan sarana dan prasarana umum.
 3. Belum jelasnya kepastian hukum antara pengelola sarana dan prasaran dengan penegak hukum.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Mengacu pada potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Padang Panjang serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat, maka visi kepala daerah Kota Padang Panjang tahun 2013-2018 adalah **Kota Padang Panjang Amanah, Aman dan Sejahtera**.

Penjabaran makna dari visi tersebut diatas adalah sebagai berikut :

Padang Panjang Amanah memiliki makna pemerintahan daerah dan masyarakat Kota Padang Panjang mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku.

Padang Panjang Aman memiliki makna tidak hanya aman dari tindak kriminalitas tapi memiliki makna yang lebih luas yaitu masyarakat sudah terlepas dari persoalan kebutuhan dasar serta lebih mandiri.

Padang Panjang Sejahtera memiliki makna menggambarkan kondisi masyarakat dalam



keadaan makmur, sehat dan damai.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang Panjang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, bidang pertanahan dan tugas pembantuan yang diberikan. Hal ini sejalan dengan pencapaian RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2013-2018 dalam hal pencapaian misi **Kelima** yaitu:

“ Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur kota. Kualitas lingkungan hidup yang baik dan menyenangkan akan dapat diwujudkan melalui pencegahan polusi udara, pengotoran air, mengupayakan lingkungan yang bersih dan segar, serta menerapkan rencana tata-ruang secara konsekuen. Termasuk dalam hal ini adalah pengelolaan sumberdaya alam berkelanjutan”.

Adapun yang menjadi faktor pendukung adalah:

1. Adanya komitmen pimpinan untuk meningkatkan sarana dan prasarana umum;
2. Adanya peraturan perundang-undangan yang mendukung sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas; dan
3. Tersedianya Sumber Daya Aparatur .

Sedangkan yang menjadi faktor penghambat adalah:

1. Masih kurangnya kompetensi aparatur teknis dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan persyaratan dan tuntutan pekerjaan.
2. Adanya keterbatasan anggaran SKPD untuk peningkatan SDM aparatur.
3. Masih rendahnya kepedulian masyarakat terhadap pemeliharaan sarana dan prasarana umum.

3.3 Telaahan Renstra Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman Propinsi Sumatera Barat

Renstra Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman Propinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015 mempunyai visi “Mewujudkan Prasarana Jalan yang andal, dan Penataan Ruang yang berkualitas serta Permukiman yang layak huni dan berkelanjutan. Adapun Misi dari Visi tersebut adalah:

1. Mewujudkan kwalitas SDM profesional.
2. Menciptakan penataan ruang yang berkualitas guna pengembangan wilayah.
3. Menyiapkan peralatan yang siap pakai dan bergerak cepat dalam penanggulangan bencana alam.



4. Mendorong pengembangan perumahan dan permukiman yang berkelanjutan , serasi, seimbang, layak huni, baik dipertanian maupun dipedesaan.
5. Mendorong terciptanya penataan bangunan yang aman, nyaman, serasi dan berwawasan lingkungan.
6. Melaksanakan pembinaan terhadap pengguna jasa dan penyedia jasa konstruksi.
7. Mewujudkan kualitas hasil pekerjaan sesuai standar teknis.

Uraian visi dan misi diatas yang termuat dalam Renstra Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman Propinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015 telah sejalan dengan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang Panjang Tahun 2013-2018, dengan visi Terwujudnya Sarana dan Prasarana Umum Yang Berkualitas dan Akuntabel.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Penataan ruang yang berkelanjutan diselenggarakan dengan menjamin kelestarian dan kelangsungan ekosistem alam dan daya dukung serta daya tampung wilayah dengan memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup, keanekaragaman hayati serta kepentingan generasi masa yang akan datang.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis merupakan instrument perencanaan lingkungan yang mengintegrasikan pertimbangan lingkungan ke dalam pengambilan keputusan pada tahap kebijakan, rencana dan program untuk menjamin terlaksananya prinsip lingkungan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

Pemantapan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup merupakan hal penting yang saling berhubungan dengan terciptanya Sarana dan Prasarana Umum Yang Berkualitas dan Akuntabel, tanpa rencana tata ruang dan wilayah serta kajian lingkungan hidup yang baik, maka penataan kota, sarana dan prasarana umum akan tidak tertib.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Setelah dilakukan penilaian terhadap beberapa isu pada Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Kota Padang Panjang dengan menggunakan Matrik USG (Urgency, Seriously dan Grown) sehingga diperoleh Isu-isu strategis yang dihadapi saat ini dalam



pengelolaan sarana dan prasarana umum pada Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Kota Padang Panjang adalah :

1. Belum lengkapnya sarana, prasarana dan teknologi penunjang untuk kelancaran pekerjaan.
2. Belum lengkapnya Data Base yang diperlukan dalam proses perencanaan.
3. Belum profesionalnya tenaga teknik pelaku jasa konstruksi.



BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang Panjang.

Visi merupakan pandangan atau gambaran tentang masa depan yang ingin diwujudkan secara realistis. Visi juga diartikan sebagai seni memandang masa depan yang ingin diwujudkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang Panjang. Visi organisasi/ Dinas haruslah visi bersama, yang mampu menarik, mengarahkan anggota organisasi untuk bertekad mewujudkan visi tersebut. Karena itu, perumusan pernyataan visi yang dilakukan kelompok eksponen organisasi perlu secara intensif dikomunikasikan kepada segenap anggota organisasi, sehingga semuanya merasa sebagai pemilik dari visi itu, maka **VISI Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang Panjang** dapat dirumuskan sebagai berikut:

*“Terwujudnya Sarana dan Prasarana Umum Kota
yang Berkualitas dan Akuntabel”*

Penjelasan dari **VISI** diatas adalah:

Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan Visi
Terwujudnya Sarana dan Prasarana Umum Kota yang Berkualitas dan Akuntabel	Terwujudnya Sarana dan Prasarana Umum	Ada dan Terkelolanya sarana dan prasarana umum di Kota Padang Panjang dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang representatif sesuai tuntutan zaman.
	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Umum Kota yang Berkualitas dan Akuntabel	<ul style="list-style-type: none"> - Sarana dan Prasarana Umum Bidang Infrastruktur yang Berkualitas adalah Sarana dan Prasarana yang Bermutu, Berdayaguna, Bermanfaat dan Berwawasan Lingkungan - Sarana dan Prasarana Umum yang Akuntabel adalah Sarana



		dan Prasarana yang mempunyai Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan sesuai Fungsinya serta dapat dipertanggung jawabkan
--	--	--

Misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang Panjang.

Dalam mencapai **VISI** Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang Panjang tersebut, maka disusun **MISI** yang akan dilaksanakan dalam periode waktu 2013 – 2018 :

MISI

1. Meningkatkan SDM Aparatur yang berkualitas, andal dan profesional.
2. Mewujudkan pembangunan yang berkualitas dibidang kePU-an.
3. Mewujudkan penataan ruang yang berwawasan lingkungan.
4. Mewujudkan kawasan kota yang bersih, asri, indah dan nyaman.

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

Tabel Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2014 – 2018 :

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Kinerja Sasaran pada Tahun ke				
					1	2	3	4	5
1	Terwujudnya pengelolaan administrasi ketatausahaan, keuangan, sarana dan prasarana yang efektif	Terselenggaranya pengelolaan administrasi ketatausahaan, keuangan, sarana dan prasarana	Tersedianya pengelolaan administrasi ketatausahaan, keuangan dan sarana dan prasarana	Tahun	1	1	1	1	1



	dan efisien	yang efektif dan efisien							
2	Terwujudnya pelayanan prima oleh aparatur terhadap masyarakat dan dunia usaha	Mewujudkan pelayanan prima oleh aparatur terhadap masyarakat dan dunia usaha	Terlaksananya pelayanan pembuatan Advice Planning (AP) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	Berkas	10 0	300	250	200	200
			Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam penataan ruang (sosialisasi)	Buah	0	10	10	2	2
			Terlaksananya pelayanan pengadaan barang dan jasa	Tahun	1	1	1	1	1
			Terlaksananya pelayanan kebinamargaan dan pengairan	Tahun	1	1	1	1	1
			Terlaksananya pelayanan keciptakaryaan	Tahun	1	1	1	1	1



3	Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur kota	Meningkatkan kualitas infrastruktur	Tersedianya dokumen perencanaan infrastruktur yang berkualitas						
			-Pembangunan gedung	Dokumen	7	3	1	0	0
			- RDT 26		2	2	0	0	0
			Tersedianya infrastruktur keciptakaryaan yang berkualitas						
			- Pembangunan drainase	Paket	18	10	7	7	7
			- Pembangunan gedung	Unit	6	4	3	2	1
			Tersedianya infrastruktur kebinamargaandan pengairan yang berkualitas						
			- Pembangunan jalan	Km	9,66	7	7	7	7
			- Pembangunan irigasi		3,65	3	2,8	2,7	2,6
			- Pembangunan rotoar		2,15	1,5	4,3	4,1	1



			Terlaksananya pengawasan pembangunan dan pengawasan infrastruktur	Patok / bangunan	100/75	100/75	100/75	100/75	100/75
4.	Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas	Terciptanya Kota Padang Panjang yang bersih, indah dan ASRI	Tersedianya sarana dan prasarana persampahan - Tempat sampah - Kontainer - Gerobak sampah - Becak motor - Pick up - Dump truck - Truck amroll - Eskavator	Set Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit	0 0 0 0 0 0 0 0	20 0 5 25 16 1 2 1	20 0 5 40 0 0 2 0	-	-
			Terlaksananya operasional kebersihan kota dan perpeliharanya sarana dan prasarana persampahan	Tahun	1	1	1	-	-
			Tersedianya Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang fungsional dan estetik.	Lokasi	2	1	1	1	1



			Terselenggaranya sosialisasi 3R (Reuse, Reduce, Recycle)	Kelurahan / Sekolah	0/0	16/39	0/34	0	0
--	--	--	--	---------------------	-----	-------	------	---	---

Strategi dan Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Rumusan pernyataan strategi dan kebijakan SKPD dalam lima tahun mendatang, sebagaimana Tabel di bawah ini.

Tabel 4.3.

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : Terwujudnya Sarana dan Prasarana Umum Kota yang Berkualitas dan Akuntabel			
MISI I : Meningkatkan SDM Aparatur yang berkualitas, handal dan profesional			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Terwujudnya pengelolaan administrasi ketatausahaan, keuangan, sarana dan prasarana yang efektif dan efisien	Terselenggaranya pengelolaan administrasi ketatausahaan, keuangan, sarana dan prasarana yang efektif dan efisien	Meningkatkan kualitas SDM yang handal dan profesional.	Peningkatan kualitas SDM aparatur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang Panjang
MISI II : Mewujudkan pembangunan yang berkualitas dibidang kePU-an			
Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur kota	Meningkatkan kualitas infrastruktur	Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan	Menyediakan dokumen perencanaan yang akurat dan tepat sasaran
		Peningkatan infrastruktur dibidang keciptakaryaan,	Melaksanakan pembangunan yang berkualitas dibidang keciptakaryaan, bina



		bina marga dan pengairan	marga dan pengairan
		Meningkatkan pengawasan pembangunan dan pengawasan infrastruktur	Melaksanakan pengawasan terhadap pembangunan dan pembangunan infrastruktur

MISI III : Mewujudkan penataan ruang yang berwawasan lingkungan.

Terwujudnya pelayanan prima oleh aparatur terhadap masyarakat dan dunia usaha	Mewujudkan pelayanan prima oleh aparatur terhadap masyarakat dan dunia usaha	Memberikan Pelayanan Prima oleh Aparatur terhadap masyarakat dan dunia usaha	Melakukan pelayanan semaksimal mungkin bagi masyarakat dan dunia usaha
---	--	--	--

MISI IV : Mewujudkan kawasan kota yang bersih, ASRI, indah dan nyaman

Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas	Terciptanya Kota Padang Panjang yang bersih, indah dan asri	Peningkatan pelayanan kebersihan kepadamasyarakat	Menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan
		Penyediaan Ruang Terbuka Hijau yang fungsional dan estetik	Melakukan penataan Ruang Terbuka Hijau dengan baik



BAB V

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Bedasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan yang telah disusun pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun (2014-2018), meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis Dinas Pekerjaan Umum dengan tetap mengacu pada program pembangunan program yang tertuang dalam RPJMD Kota Padang Panjang 2014-2018.



BAB VI

**INDIKATOR KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

Berikut ini Tabel 6.1 Indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selama tahun 2014-2018 yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kota Padang Panjang sebagaimana berikut :

Tabel 6.1. Indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kota Padang Panjang selama tahun 2014-2018

Tabel.6.1

**INDIKATOR KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
KOTA PADANG PANJANG SELAMA TAHUN 2014-2018**

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Kinerja Sasaran pada Tahun ke					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Tersedianya pengelolaan administrasi ketatausahaan, keuangan, sarana dan prasarana		1	1	1	1	1	5
2	Terlaksananya pelayanan pembuatan AP dan IMB		100	300	250	200	200	1.050
	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam penataan ruang		10	10	10	2	2	34
	Terlaksananya pelayanan kebinamargaan dan pengairan		1	1	1	1	1	5



	Terlaksananya pelayanan keciptakaryaan		82%	84%	86%	88%	90%	90%
	Tersedianya infrastruktur keciptakaryaan yang berkualitas		6 1	4 1	3 1	2 1	1 1	16
	Tersedianya infrastruktur kebinamargaan dan pengairan yang berkualitas		1,15	1	1		1	5,15
4	Tersedianya Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang fungsional dan estetik		2	1	1	1	1	6
	Terselenggaranya 3R (Reuse, Reduce, Recycle)		0/0	16/39	0/34	0	0	16/73



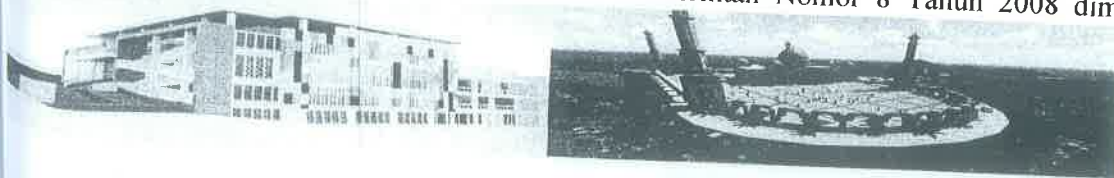
BAB VII PENUTUP

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penyusunan, Tatacara Evaluasi Pengendalian Perencanaan Pembangunan, diamanatkan bahwa masing OPD diharuskan menyusun Rencana Strategis dengan mempedomani Dokumen Perencanaan lainnya seperti RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) dan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah). Dalam Renstra OPD tersebut disusun Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang hendak dicapai oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah tersebut. Jadi Renstra ini merupakan acuan bagi OPD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk kurun waktu 5 tahun ke depan. Sebagai bentuk nyata dari Visi ditetapkanlah Misi Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk menggambarkan hal yang seharusnya terlaksana, sehingga hal-hal masih abstrak terlihat pada visi akan lebih nyata pada misi tersebut. Lebih jauh pernyataan dinas memperlihatkan kebutuhan apa yang hendak dipenuhi oleh organisasi, siapa yang memiliki kebutuhan tersebut dan bagaimana memenuhi kebutuhan tersebut.

Implementasi Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang Panjang dijabarkan kedalam program dan kegiatan berdasarkan kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan. Untuk melaksanakan program dan kegiatan tersebut dialokasikan dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Padang Panjang. Pada dasarnya setiap kegiatan yang ada dalam Renstra dilengkapi dengan indikator kinerja, baik indikator kinerja output maupun indikator outcome. Target kinerja mempresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai pada setiap tahun sesuai periodisasi Renstra (2013 - 2018). Target kinerja tersebut juga digunakan untuk mengukur keberhasilan organisasi dalam upaya pencapaian visi, misi yang telah ditetapkan. Kinerja kegiatan juga didefinisikan dalam Rencana Kerja (Renja OPD) yang dibuat setiap tahun, dengan harapan bisa dilihat tahapan pencapaian target kinerja dari OPD bersangkutan pada tahun berjalan. Dengan demikian semua kegiatan yang telah dilaksanakan dapat dipertanggungjawabkan baik secara fisik / keuangan dan pencapaian kinerjanya terukur

Dilihat dari sudut Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dari kegiatan yang telah dilaksanakan setiap tahun anggaran, dapat dilihat dari LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) yang disusun pada akhir tahun anggaran dengan demikian pelaksanaan kegiatan dapat dinilai dan dipertanggungjawabkan secara transparans.

Setelah 3 (tiga) tahun periode renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berjalan dimana sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 dimana



Renstra OPD dapat dilakukan perubahan sejalan dengan Perubahan RPJMD Kota Padang Panjang tahun 2013-2018 dan sinkronisasi renstra pada kementerian terkait dan OPD terkait pada Propinsi. Perubahan RPJMD Kota Padang Panjang telah dilakukan pada tahun 2016 yang lalu. Sehubungan dengan hal tersebut diperlukan melakukan perubahan terhadap renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang Panjang Tahun 2013-2018 untuk penyesuaian dengan perubahan RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2013-2018 dan sinkronisasi dengan renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat maupun sinkronisasi dengan renstra Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Sumatera Barat.

Padang Panjang, Mei 2017

**Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Padang Panjang**


YAS EDIZARWIN, SH
NIP. 196307271992031004



Program/Kegiatan	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio antara Realisasi dan anggaran Tahun ke					Referensi Perumbuhan		
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Program Peningkatan Disiplin Aparatur																		
- Pengedean pakelan dinas beserta pengelapannya	71.000.000	41.900.000			57.250.000	57.000.000	41.450.000				94,4%	98,63%				55.687.500	(46.275.000)	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur																		
- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan	75.000.000	127.500.000	57.500.000	40.000.000	40.000.000	37.025.000	96.670.000	25.500.000			48,4%	75,88%				35.000.000	26.150.000	
- Bimbingan Teknis GEOGRA BASE			35.772.500					25.532.600				70,32%					12.500.000	
- Pelatihan Kantor Sendiri					82.600.000													
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan																		
- Penyusunan laporan capaian kinerja dan indikator realisasi kinerja SKPD	535.000	358.000	388.000	385.000	389.000	534.500	348.000	395.000			99,9%	97,21%				(149.000)	(162.500)	
- Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	531.000	530.000	577.500	560.000	560.000	528.300	520.000	579.500			95,1%	98,11%				29.000	21.450	
- Penyusunan... pelaporan progres realisasi anggaran	555.000	593.000	742.000	620.500	620.500	582.000	580.000	588.500			97,8%	98,45%				25.500	52.750	
- Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	2.890.000	589.000	651.500	621.000	621.000	2.879.750	587.000	651.000			98,6%	98,65%				(2.258.000)	(2.260.750)	
Program Pengembangan Data/Informasi																		
- Pengumpulan, Updeting dan Analisa Data, Informasi Cepatan Target Kinerja Program dan Kegiatan			118.750.000					52.400.000										46.200.000
Program Koordinasi dan Pemberdayaan Kalemeng/Pelayanan Sthm Informal Terpadu																		
- Peningkatan pelayanan berstandar ISO 9001			101.450.000					99.200.000										49.600.000
Program Gedung dan Bangunan																		
- Pembangunan Gedung Tempat Isabah Pertemuan				444.200.000												333.150.000		
- Pembangunan Gedung Tempat Pertemuan				27.464.194.638	17.481.500.000											24.568.500.229		
- DED Gedung Pakir				500.000.000												375.000.000		
- DED Pembangunan Gedung Kantor				1.077.250.000												807.897.500		
- Pembangunan Gedung Perbaikan/Koperasi/Pasar (K/Pasar Pusat) Pasar Padang Panjang				507.000.000												380.250.000		
- Pembangunan gedung serbaguna dan muchala kantor cemat padang panjang barat																		
Program peningkatan sarana dan prasarana olah raga																		
- Peningkatan sarana dan prasarana olah raga		1.081.165.000					41.200.000					3,81%						20.600.000
Program Pengembangan Disiplin Wilada																		
- Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata		161.850.000					149.077.000					92,10%						74.538.500

Program/Kegiatan	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio antara Realisasi dan anggaran Tahun ke					Ratrasio Pertumbuhan		
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	12	13	
1																		
Program Pembinaan Jasa Komtribusi																		
- Pembinaan Kemandirian dan Sumber Daya Komtribusi					24.000.000													
- Pembinaan Kompetensi dan Produktifitas Komtribusi					113.540.000													
- Pembinaan Terobos Penyelenggaraan Komtribusi					99.630.000													
	58.252.588.209	89.484.921.180	196.148.275.995	225.648.308.605	99.846.833.000	49.180.752.257	70.783.204.140	86.423.254.288			84,4%	75,10%	49,15%		100.903.591.482		316.427.455.932	

Pedang Panjang, Mei 2017

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Pedang Panjang



YAS ENZARAHAN
NIP. 19630727 199203 1 004

Tabel 4.1

Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang Panjang Tahun 2014-2016

No	Indikator Kinerja sesuai Tupoksi OPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra OPD Tahun ke					Realisasi Capaian Renstra OPD Tahun ke					Realisasi Capaian Renstra OPD Tahun ke				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	Tersedianya pengelolaan administrasi ketatausahaan, keuangan dan sarana dan prasarana	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2	Terlaksananya pelayanan pembuatan Advice Planning (AP) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	-	-	-	100	300	250	200	200	100	300	250	200	200	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
3	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam penataan ruang (sosialisasi)	-	-	-	0	10	10	2	2	0	10	10	10	10	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
4	Terlaksananya pelayanan pengadaan barang dan jasa	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
5	Terlaksananya pelayanan kebinamargaan dan pengairan	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
6	Terlaksananya pelayanan keciptakaryaan	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
7	Tersedianya dokumen perencanaan infrastruktur yang berkualitas - Pembangunan gedung - RDTR	-	-	-	7	3	1	0	0	7	3	1	0	0	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
					2	2	0	0	0	2	2	0	0	0					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
8	Tersedianya infrastruktur keciptakaryaan yang berkualitas - Pembangunan drainase - Pembangunan gedung	-	-	-	18 6	10 4	7 3	7 2	7 1	18 6	10 4	7 3			100 %	100 %	100 %			
9	Tersedianya infrastruktur kebinamargaan dan pengairan yang berkualitas - Pembangunan jalan - Pembangunan irigasi - Pembangunantrotoar	-	-	-	9,66 3,65 2,15	7 3 1,5	7 2,8 4,3	7 2,7 4,1	7 2,6 1	9,6 6 3,6 5 2,1 5	7 3 1,5	7 2,8 4,3			100 %	100 %	100 %			
10	Terlaksananya pengawasan pembangunan dan pengawasan infrastruktur	-	-	-	100/ 75	10 0/ 75	10 0/ 75	100/ 75	10 0/ 75	10 0/ 75	100 /75	100/ 75			100 %	100 %	100 %			
11	Tersedianya sarana dan prasarana persampahan - Tempat sampah - Kontainer - Gerobak sampah - Becak motor - Pick up - Dump truck - Truck amroll - Eskavator	-	-	-	0 0 0 0 0 0 0 0	20 0 5 25 16 1 2 1 1	20 0 5 40 0 0 2 0 0	-	-	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 25 16 1 2 1 0	200 5 25 40 16 1 2 1 1	200 5 40 0 0 2 0 0			100 %	100 %	100 %		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
12	Terlaksananya operasional kebersihan kota dan perpeliharannya sarana dan prasarana dan persampahan	-	-	-	1	1	1	-	1	1	1	1			100 %	100 %	100 %		
14	Tersedianya Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang fungsional dan estetik.	-	-	-	2	1	1	1	1	2	1	1			100 %	100 %	100 %		
15	Terselenggaranya sosialisasi 3R (Reuse, Reduce, Recycle)	-	-	-	0/0	16/39	0/34	0	0	0/0	16/39	0/34			100 %	100 %	100 %		

Padang Panjang, Mei 2017

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Padang Panjang


YAS EDIZARWIN, SH
NIP. 196307271992031004

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Bidang Penanggung Jawab				
						Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra						
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14				
Terwujudnya pengelolaan	Terselenggaranya pengelolaan		1.01.1.01.03.01.01.	- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran												
			1.01.1.01.03.01.01.01	- Penyediaan jasa surat menyurat	1800 Surat	4.720.000	1800 Surat	3.270.000	2 tahun	7.990.000				Sekretariat		
			1.01.1.01.03.01.01.02	- Penyediaan jasa komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	36 Tagihan	2.849.160.000	36 Tagihan	2.887.200.000	2 tahun	5.736.360.000					Sekretariat	
			1.01.1.01.03.01.01.06	- Penyediaan jasa pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	3 unit roda 6,9 unit roda 4, 19 unit roda 2	772.668.350	3 unit roda 6,9 unit roda 4, 19 unit roda 2	458.024.250	2 tahun	1.228.712.600						Sekretariat
			1.01.1.01.03.01.01.07	- Penyediaan jasa Administrasi Keuangan	15 Laporan	524.100.000	15 Laporan		2 tahun	524.100.000						Sekretariat
			1.01.1.01.03.01.01.08	- Persentase realisasi keuangan belanja alat kebersihan kantor		310.443.150	100%	213.757.000	2 tahun	524.200.150						Sekretariat
			1.01.1.01.03.01.01.10	- Persentase realisasi keuangan belanja ATK		52.446.000	100%	13.787.000	2 tahun	66.213.000						Sekretariat
			1.01.1.01.03.01.01.11	- Persentase realisasi keuangan belanja barang cetakan dan penggandaan		59.454.000	100%	53.990.000	2 tahun	113.444.000						Sekretariat
			1.01.1.01.03.01.01.12	- Persentase realisasi belanja komponen listrik		7.413.600	100%	7.413.600	2 tahun	14.827.200						Sekretariat
			1.01.1.01.03.01.01.17	- Jumlah rapat terlaksana		46.520.000	100%	7.700.000	2 tahun	54.220.000						Sekretariat
			1.01.1.01.03.01.01.18	- Jumlah perjalanan dinas dalam dan luar provinsi		432.000.000	100%	500.000.000	2 tahun	932.000.000						Sekretariat
						1.01.1.01.03.01.02.	- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur									
						1.01.1.01.03.01.02.22	- Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor	100%	30.000.000	100%	30.000.000		2 tahun			
						1.01.1.01.03.01.02.33	- Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Umum	100%	150.000.000	100%	218.225.000		2 tahun			

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Data Cepalan pada Tahun Awal	Teget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Bidang Penanggung Jawab	
						Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	
		Terdilaksananya Landscape Pembangunan Gedung Wisma Pembangunan Gedung Sosial Budaya Islamic Centre	1.01.1.01.03.01.02.71	Pembuatan Lanscape Pembangunan Gedung Wisma Pembangunan Gedung Sosial Budaya Islamic Centre		100%		100%					
		Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dilakukan pengadaannya	1.01.1.01.03.01.02.	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	9 unit sepeda motor, 5 unit pick up, 3 unit mini bus	1 unit mobil micro bus		Mobil Pick Up 2 Unit, Mobil Mini Bus 1 Unit		2 tahun		Sekretariat	
		Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dilakukan pengadaannya	1.01.1.01.03.01.02.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	41 unit komputer, 15 unit printer, 21 unit laptop, 1 unit kamera, unit genset, UPS 1 unit, infokus 1 unit, GPS 4 unit, meteran digital 2 unit, teken scale 1 unit, Filling unit, kabinret 9 buah, brangkas 1 buah, teodolit 1 buah	3 unit printer A4		2 unit printer A4		2 tahun		Sekretariat	
		Jumlah Peralatan kantor yang dilakukan pengadaannya	1.01.1.01.03.01.02.	Pengadaan peralatan kantor	0								Sekretariat
		Jumlah mebeleur yang dilakukan pengadaannya	1.01.1.01.03.01.02.	Pengadaan Mebeleur	1 paket			100%					Sekretariat
		Persentase pemeliharaan alat-alat kantor	1.01.1.01.03.01.02.30	Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kantor		1 tahun	15.150.000	1 tahun	14.175.000	2 tahun	29.325.000		Sekretariat
		Tenwujudnya Prasana umum yang representatif	1.01.1.01.03.01.02.71	Pembangunan Islamic Centre Kora Padang Panjang		100%	31.634.896.400	100%	5.261.700.000	2 tahun	36.896.596.400		Bidang CK
		Tersusunnya Buku analisa harga satuan	1.01.1.01.03.01.02.74	Penyusunan Buku Analisa Harga Satuan		40 buku	58.000.000	40 buah	14.400.000	2 tahun	72.400.000		Bidang Bina Program, Perenc dan Lajon

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Taget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Bidang Penanggung Jawab
						Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14
		Jumlah Dokumen Perencanaan yang dibuat	1.01.1.01.03.01.02.80	Perencanaan Teknis ke PU dan	28 dokumen	75.000.000	75.000.000	50 dokumen		1 tahun	75.000.000	
		Terserifikasinya tanah Pemrintah Daerah	1.01.1.01.03.01.02.83	Penserifikasinya Tanah Pemrintah Daerah	2 perisi	111.870.968	111.870.968	1 tahun		1 tahun	111.870.968	Bidang Tata Ruang
			1.01.1.01.03.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur								
		Jumlah ASN PUPR yang mengikuti BinteK	1.01.1.01.03.01.05.03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan	8 org	40.000.000	40.000.000	9 org	40.000.000	2 tahun	80.000.000	Sekretariat
		Jumlah ASN PUPR yang mengikuti BinteK	1.01.1.01.03.01.05	Palatihan Kantor Sendiri	30 Org		82.600.000	1 kali	82.600.000	2 tahun		
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur								
		Jumlah pakiaian dinas beserta perlengkapan yang dibeli		Pengadaan pakiaian dinas beserta perlengkapannya			57.250.000	70 stel	57.250.000	2 tahun	57.250.000	Sekretariat
			1.01.1.01.03.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan								
		Jumlah laporan capaian kinerja dan realisasi Kinerja SKPD	1.01.1.01.03.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan krtisar realisasi kinerja SOPD	15 laporan	385.000	385.000	15 laporan	385.000	2 tahun	774.000	Sekretariat
		Jumlah laporan semesteran	1.01.1.01.03.01.06.02	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	2 laporan	560.000	560.000	2 laporan	560.000	2 tahun	1.120.000	Sekretariat
		Jumlah laporan prognos realisasi anggaran	1.01.1.01.03.01.06.03	Penyusunan pelaporan prognos realisasi anggaran	1 laporan	620.500	620.500	1 laporan	620.500	2 tahun	1.241.000	Sekretariat
		Jumlah laporan keuangan akhir tahun	1.01.1.01.03.01.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	1 laporan	621.000	621.000	1 laporan	621.000	2 tahun	1.242.000	Sekretariat
			1.01.03.1.01.03.01.13	Program Gedung dan Bangunan								
		Teraksananya pembangunan gedung tempat ibadah	1.01.031.01.03.01.13.04	Pembangunan Gedung Tempat Ibadah	1 gedung	444.200.000	444.200.000	1 laporan		1 tahun	444.200.000	Bidang CK
		Teraksananya pembangunan gedung tempat pertemuan	1.01.031.01.03.01.13.05	Pembangunan Gedung Tempat Pertemuan	1 gedung	27.464.193.638	17.481.500.000	1 laporan	17.481.500.000	2 tahun	44.945.693.638	Bidang CK
		Tersusunnya DED gedung parkir	1.01.031.01.03.01.13.06	DED Gedung Parkir	1 dokumen	500.000.000	500.000.000	1 laporan		1 tahun	500.000.000	Bidang Bina Program Perenc dan Jalon
		Tersusunnya DED gedung kantor	1.01.031.01.03.01.13.07	DED Pembangunan Gedung Kantor	1 dokumen	1.077.250.000	1.077.250.000	1 laporan		1 tahun	1.077.250.000	Bidang Bina Program Perenc dan Jalon
		Teraksananya pengawasan Pasar Pusat oleh Konsultan	1.01.031.01.03.01.13.08	Bangunan Gedung Perbaikan/Koperasi/Pasar (MK Pasar Puser) Pasar Padang Panjang	1 dokumen	507.000.000	507.000.000	1 laporan		1 tahun	507.000.000	Bidang Bina Program Perenc dan Jalon

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Bidang Penanggung Jawab
						Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14
		Jumlah Alat - alat Berat (Mini Tandem, Compressor, Jack Hammer, Breaker)	1.01.03.1.01.03.01.23	Pengadaan Alat - alat Berat (Mini Tandem, Compressor, Jack Hammer, Breaker)	1.226 tiang	30 Tiang	2.641.750.000	30 Tiang	1.448.800.000	2 tahun	4.090.550.000	Bina Marga
		Bertambahnya jaringan tiang dan lampu jalan dalam kota	1.01.03.1.01.03.01.23.14	Penambahan Jaringan Tiang dan Lampu Jalan Dalam Kota	1.226 tiang	100%	262.400.000	100%	385.742.800	2 tahun	648.142.600	Bina Marga
		Terpeliharanya jaringan, tiang, dan lampu jalan dalam kota	1.01.03.1.01.03.01.23.15	Pemeliharaan Jaringan Tiang dan Lampu Jalan Dalam Kota								
			1.01.03.1.01.03.01.24	Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengaliran Lainnya								
		Terlaksananya Pembangunan Irigasi	1.01.03.1.01.03.01.24	Pembangunan Irigasi (DAU)								
		Terlaksananya Jaringan Irigasi	1.01.03.1.01.03.01.24.18	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi		100%	4.547.250.000	100%	4.547.250.000	1 tahun		
		Terlaksananya pemeliharaan irigasi	1.01.03.1.01.03.01.24	Pemeliharaan Rutin Irigasi	5.000 m,	2.000 m, 9 dok pvc, 9 irigasi	4.980.000.000	2.000 m		1 tahun	4.980.000.000	Bina Marga
		Jumlah DED infrastruktur irigasi	1.01.03.1.01.03.01.24.19	Dana penunjang operasional DAK Infrastruktur irigasi		9 dok pvc	212.112.000	100%	226.750.000	2 tahun		
		Jumlah Bangunan Pembawa Irigasi yang dibangun	1.01.03.1.01.03.01.24.20	Bangunan Pembawa Irigasi		16 irigasi	3.604.100.000	100%	4.086.050.000	2 tahun		
			1.01.03.1.01.03.01.24.18	Penyusunan Sistem Informasi/Database Jalan				50%	80.850.000	1 Tahun		
			1.01.03.1.01.03.01.27	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah								
		Tersedianya sarana dan prasarana bersih dan air limbah (termasuk MCK dan septikank komunal)	1.01.03.1.01.03.01.27.17	DAK air minum	MCK 13 buah reservoar 4 buah	2 SPAM	3.289.000.000	2 SPAM	3.115.650.000	2 tahun	6.404.650.000	Cipta Karya
		Tersedianya sarana dan prasarana bersih dan air limbah (termasuk MCK dan septikank komunal)	1.01.03.1.01.03.01.27.18	Dana penunjang operasional (DAK Infrastruktur Air Minum dan Sanitasi)	MCK 13 buah reservoar 4 buah	1 SPAM	91.900.000	1 SPAM	150.000.000	2 tahun	241.900.000	Cipta Karya
		Tewujudnya Bangunan Pembawa Air Bersih	1.01.03.1.01.03.01.27	Bangunan Pembawa Air Bersih								
		Tersedianya Infrastruktur Air Limbah	1.01.03.1.01.03.01.27	DAK Infrastruktur Air Limbah		100%	1.110.300.000	100%	1.110.300.000	2 tahun		
		Tersedianya sarana dan prasarana bersih dan air limbah (termasuk MCK dan septikank komunal)	1.01.03.1.01.03.01.27	Pembangunan sarana dan prasarana air minum dan air limbah (DAK Infrastruktur Air Minum dan Sanitasi)	MCK 13 buah reservoar 4 buah	2 lokasi		2 lokasi		2 tahun		Cipta Karya

